

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arrasjid, C. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bohari. (2012). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (2006). *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwidja, P. (2004). *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*. Jakarta: Kanisius.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Moeljatno. (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Nawawi, A. B. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nawawi, B. (2006). *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1976). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prints, D. (2001). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. (2002). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta:

Refika Aditama.

R.Subekti, & Tjitrosoedibyo. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2004). *Dasar-Dasar Filasafat Dan Teori Hukum* (9th ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ridwan, H. . (2014). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press.

Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Saidi, M. D. (2011). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Saputra, H. (2008). *Pelaksanaan eksekusi denda uang tilang Perkara pelanggaran lalu lintas Oleh kejaksaan negeri salatiga (studi kasus di kejaksaan negeri salatiga)*. Solo.

Sekedang, E. (2016). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN AGAMA YANG MENGGUNAKAN SARANA INTERNET. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 4.

Setijo, P. (2015). *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa* (4th ed.). Jakarta: Grasindo.

Sholehuddin. (2002). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Simorangkir, J. C. ., Erwin, R. T., & Aj.T.Prasetyo. (2000). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soejono. (1996). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka

Cipta.

Soekanto, S. (2014a). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (13th ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. (2014b). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (11th ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarsono. (2002). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Todingrara, M. (2013). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Kasus di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2012)*. Makassar.

Utami, A. T. (2014). *Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang.

Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.

Widhiatuti, D. (2016). *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar*. Makassar.

Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Dinamika Hukum Universitas Jendral Soedirman*, 14.

Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1963 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Kendaraan Bermotor
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 14 tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa atas Kendaraan Bermotor yang diimpor ke dalam Daerah Pabean Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
7. Peraturan Kapolri No. 5 tahun 2012 tentang Registrasi & Identifikasi Kendaraan Bermotor